

BANGKITNYA PAHAM KOMUNIS DI INDONESIA

Firdaus

Politeknik Piksi Ganesha

Firdaus_05@ymail.com

ABSTRACT

The reforms in 1998 resulted in the fall of the New Order government under the leadership of President Suharto. The New Order government was anti-communist and did not provide space for communists to live in the Unitary State of Republic of Indonesia. With the fall of The New Order, freedom of speech and the establishment of political parties were granted. Therefore, the People's Democratic Party (FRD) under the leadership of Budiman Sudjatmoko, who since the New Order era has always criticized the policies of the New Order government. FRD registered itself. In its development, FRD changed its strategy, namely that most of the members spread out and entered major political parties such as the Indonesia Democratic Party of Struggle (PDIP) and other nationalist-based political parties. By joining major political parties, many former FRD members sat in the People's Representative Council (DPR). After they sat in the DPR, especially after the PDIP won 2014 general election, many DPR products were controversial in the life of society and the nation, such as the Draft Law (RUU) for the path of Pancasila Ideology (BPIP) in 2020. These two bills have caused controversy because they are alleged to have revived Bung Karno's teachings, namely the Nasakom (Religious Nationalist and Communist) concept.

Keywords: *ideology, communist, pancasila, and reform*

ABSTRAK

Reformasi pada tahun 1998 mengakibatkan tumbangannya pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintahan orde baru yang anti komunis dan tidak memberikan ruang bagi komunis untuk hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tumbangnya Orde Baru memberikan kebebasan berbicara dan mendirikan partai politik. Oleh karena itu, Partai Rakyat Demokrasi (FRD) di bawah pimpinan Budiman Sudjatmoko yang sejak masa orde baru selalu mengkritisi tiap kebijakan pemerintah orde baru. FRD mendaftarkan diri sebagai Partai politik peserta Pemilu pada tahun 1999. Dalam perkembangannya FRD tidak mendapat tempat dan simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh karena itu, FRD mengubah strategi, yaitu sebagian besar anggota menyebar dan masuk ke dalam partai politik besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai politik lain yang berbasis nasionalis. Dengan bergabungnya ke Partai Politik besar banyak bekas anggota FRD yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah mereka duduk di DPR apa lagi setelah PDIP memenangkan Pemilu tahun 2014 banyak produk-produk DPR yang menuai kontroversial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan pengganti RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang diusulkan pada tahun 2020. Kedua RUU ini menimbulkan kontroversial karena disinyalir

mnghidupkan kembali ajaran Bung Karno, yaitu konsep Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis).

Kata kunci : ideologi, komunis, pancasila dan reformasi

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia Partai Komunis (PKI) Indonesia pernah melakukan pemberontakan dua kali, yaitu pada tahun 1948 dan 1965. Oleh karena itu, PKI dengan paham komunis tidak boleh hidup di Indonesia sesuai dengan isi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor: XXV/1966. Selama pemerintahan orde baru ide-ide paham komunis tidak bisa berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi setelah tumbangny pemerintah orde baru dengan reformasi 1998, maka ide-ide paham yang berbau komunis mulai terdengar. Apalagi setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memenangkan pemilu tahun 2014 ide-ide komunis semakin tambah berkembang. Dengan latar belakang tersebut dapat dikembangkan permasalahan sebagai berikut; Bagaimana kondisi politik di Indonesia setelah reformasi 1998 dan tanda-tanda bangkitnya paham komunis. Dengan penelitian diharapkan dapat memperjelas kondisi politik di Indonesia dan dapat menjadi sumber data dalam mengantisipasi untuk masa depan NKRI agar pengalaman pahit yang pernah terjadi dengan gerakan komunis tidak terulang lagi dalam sejarah republik Indonesia.

METODE

Mengingat jurnal ini merupakan kajian artikel konseptual maka langkah awal yang dilakukan adalah tahapan pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku dan artikel yang didapat baik di internet maupun majalah dan surat kabar dan dokumen keputusan instansi pemerintah. Langkah selanjutnya analisis kritik data baik sumber data di dapat maupun materi permasalahan melalui kritik data secara intern dan ekstern. Setelah kritik data dilakukan maka langkah berikutnya analisis deskriptif untuk

memperoleh gambaran secara jelas permasalahan yang sedang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunisme sebagai bagian dari sejarah Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan. Komunisme juga telah turut membentuk dinamika tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Komunis di Indonesia yang berasal dari organisasi masyarakat Indische Social Democratie Volk yang dibawa oleh Smokiil ke Indonesia pada tahun 1914 dan berubah menjadi Komunis Indonesia pada tahun 1921. Organisasi tersebut setelah Indonesia merdeka menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam perkembangan sejarah pernah melakukan penghianatan terhadap negara, yaitu dengan meakukan pemberontakan pada tahun 1948, ketika Indonesia baru merdeka tiga tahun. Pengianat berikutnya dilakukan pada tahun 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S PKI). Dengan tujuan untuk mengukudeta pemerintahan dan melakukan pmbunuhan terhadap para jendral Angkatan Darat serta terhadap rakyat yang bersebrangan dengan ideologi Komunis.

Berdasarkan dua Peristiwa tersebut pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1966 melalui MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor: XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan penyebaran paham komunis di Indonesia. Dengan dikeluarkannya ketetapan tersebut pemerintah orde baru yang dipimpin oleh Jendral Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia tidak memberikan kepada paham Komunis untuk hidup di bumi Nusantara. Semua Intansi pemerintah dibersihkan dari paham Komunis. Para pelaku utama dalam pemberontakan G 30S PKI ditangkap dan di hukum keras dibuang ke Pulau Buru. Bahkan tokoh-tokoh pemberontakan sampai dieksekusi mati. Adapun keluarga dan anak

keturunannya tidak boleh menjadi pegawai negeri dan diawasi secara ketat. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk tetap hidup orang-orang keturunan PKI, yaitu berprofesi sebagai pedagang dan petani.

Pada saat reformasi 1998 terjadi di Indonesia yang mengakibatkan tumbangnya pemerintahan orde baru yang melengserkan presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Pada saat orde baru berkuasa paham komunis tidak diberikan kesempatan untuk berkembang dan pemerintah tidak memberikan kebebasan untuk berbicara atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, tumbangnya orde baru bangsa Indonesia memasuki sejarah baru, yaitu masa orde reformasi.

Orde reformasi adalah orde kebebasan untuk berbicara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang kiri (Komunis) yang pada masa orde baru tidak banyak berbicara, maka mereka mulai berbicara ide-ide paham komunis dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Muncul seperti nama Budiman Sudjatmiko, Dita Indah Sari, Wiji Tukul dan yang lainnya mereka tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD). Partai ini pada pemilu tahun 1999 ikut pemilu Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka ini memang tidak pernah menyatakan sebagai kader komunis atau berbicara komunis, karena memang dilarang hidup di Indonesia. Mereka selalu membicarakan ide-ide kerakyatan, tetapi kalau dilihat dari cara pergerakan orang-orang PRD, sama seperti gerakan paham komunis. Oleh karena itu, sebagai pengamat mencurigai mereka adalah kelompok Neo-Komunisme. Dalam pergerakannya PRD menggalang kekuatan melalui petani, buruh, seni budaya, dan pergerakan mahasiswa. Disamping itu mereka suka mengadakan rapat-rapat yang selalu dihadiri oleh anak keturunan dari aktivis Partai Komunis Indonesia tahun 1965 dan kadang hadir juga tokoh PKI 1965 yang masih hidup.

Dalam perkembangannya Partai Rakyat Demokratik tidak mendapat tempat atau simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh karena itu mereka mengubah strategi, yaitu anggotanya tidak lagi berkumpul di PRD tetapi menyebar atau masuk ke dalam Partai politik nasionalis yang besar seperti di PDIP dan partai lain dengan membawa ide-ide komunis, seperti Budiman Sudjatmiko bergabung dengan PDIP dan telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Keberadaan mereka di DPR terlihat pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2003, Fraksi PDIP mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan paham Komunis di negara Republik Indonesia. Usulan PDIP itu sangat tidak logis, anggota DPR dari partai lain dan para ahli politik menganggap bahwa PDIP telah disusupi oleh paham komunis atau yang dikenal dengan Neo-Komunis. Siapa lagi yang mengusulkan pencabutan Tap MPRS di atas kalau bukan orang yang berpaham komunis.

Pada tahun 2014 PDIP memenangkan pemilu presiden dengan mengusung Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sejak PDIP memegang kekuasaan eksekutif dan menduduki suara mayoritas di parlemen atau badan legislatif banyak mengeluarkan kebijakan dan peraturan-peraturan kontroversial. Hal ini yang menyebabkan banyak menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia.

Pada tanggal 28 Februari 2018 Presiden Joko Widodo memandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 Badan Pembina Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Badan ini mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peraturan Presiden menimbulkan kontra di masyarakat karena tidak arah dan

lingkup kerja atau tupoksi dan yang sangat dikhawatirkan apa yang terjadi seperti Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pada zaman orde baru, sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan yang mengakibatkan Pancasila sebagai Ideologi dipertanyakan, karena gagal membawa Indonesia menjadi negara maju yang lebih berbahaya lagi ada yang menginginkan mengganti dasar negara republik Indonesia dengan ideologi lain.

Pada tanggal 20 April 2020 Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) untuk ditetapkan dalam program legalisasi nasional tahun 2020. Pengusulan ini mendapat reaksi keras dari sebagian besar masyarakat Indonesia meliputi tokoh-tokoh politik dan agama dengan melakukan demonstrasi secara besar-besaran di ibu kota negara dan wilayah propinsi dan kabupaten. Mereka menganggap bahwa RUU HIP dipengaruhi komunis yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Begitu banyaknya gelombang protes dari masyarakat luas terhadap RUU HIP, pemerintah dan DPR akhirnya bersepakat untuk menunda pembahasan RUU HIP. Dalam masa penundaan tersebut, ternyata pada tanggal 16 Juli 2020 pemerintah melalui Menteri Politik dan Hukum Machfud M D menarik RUU HIP sebagai gantinya pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Badan Pembina Ideologi Pancasila (RUU BPIP) sebagai pengganti RUU HIP. Pengusulan RUU pengganti ini juga menimbulkan reaksi dari masyarakat luas.

Pada tanggal 20 Agustus 2020 Majelis Ulama Islam (MUI) mengeluarkan Maklumat berupa peringatan (Tahdzir) menolak keras RUU BPIP dalam maklumat tersebut MUI meminta Presiden membubarkan BPIP. Di samping itu, MUI mengingatkan kepada presiden bahwa keputusan Presiden No: 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila telah menjadi

sumber penyelwengan sejarah dan menjadi polemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menetapkan hari lahir tanggal 1 Juni. Oleh karena itu, MUI meminta kepada Presiden untuk mencabut keputus Presiden No: 24 tahun 2016 dan mengeluarkan keputusan baru dengan menetapkan hari lahir Pancasila adalah tanggal 18 Agustus 1945, sehingga dapat menghentikan polemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu guru besar Universitas Indonesia Taufik Burhanudin, berdasarkan hasil riset mahasiswa program doktoral di Universitas Indonesia, mengatakan adanya gerakan komunis gaya baru, yaitu begitu besahabatnya Indonesia dengan China yang ideologinya komunis tetapi menjalankan ekonomi secara kapitalis. Burhanudin menjelaskan komunis gaya baru ini bergerak dan terus menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah, parpol, dan mereka tidak tampil langsung namun menggunakan kepanjangan tangan melalui Buzzer yang disinyalir ada yang mendanai untuk melakukan provokasi dan membuat perpecahan atau konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu komunis gaya baru menyusup ke Ormas-Ormas Islam dengan mengadu domba sesama umat muslim dan merakan berhasil membubarkan Hizbulthair Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI) dan akhir-akhir ini juga mengisukan pembubaran Majelis Ulama Islam. Hal tersebut mereka lakukan terhadap Islam, karena Islam merupakan penghalang bagi mereka untuk membangkitkan komunis di negara kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini harus mewaspadai pernyataan-pernyataan kontraversial yang akan memecah belah bangsa ini dan harus bisa bertindak bijaksana dalam menyikapi situasi seperti sekarang ini. Demikian Organisasi Masyarakat yang ada di negeri ini lebih dewasa dalam menyikapi setiap perbedaan yang mengarah pada perpecahan bangsa, sehingga bangsa ini dapat berjaya

dan terhidar dari konflik yang akan merugikan bangsa dan generasi yang akan datang.

SIMPULAN

Jatuhnya Pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membawa perubahan dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai politik berdiri, diantaranya Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibawah pimpinan Budiman Sudjatmiko yang berhaluan sosialis demokratik, Partai ini kurang mendapat simpati dari masyarakat dan akhirnya sebagian besar anggotanya bergabung dengan partai politik besar, seperti Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP). Banyak orang PRD yang duduk di PDIP terpilih menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak saat itu DPR sering mengeluarkan pernyataan dan produk-produk kontroversial, diantaranya penghapusan ketetapan MPRS nomor: XXV/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan penyebaran paham Komunis di Indonesia. Selain itu dikeluarkan juga produk RUU. Kedua Produk mendaapat pertentangan dari tokoh intelektual dan Ulama, sehingga diusulkan untuk membatalkan RUU BPIP dan mebubarkan BPIP.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, Taufiq. (2015). *Sesudah 50 Tahun Gagalnya Kudeta PKI (1965-2015)*. Jakarta: Republika.

Latif, Busjarie. (2014). *Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI (1920 – 1965)*. Bandung: Ultimus.

Tanjung, Alfian. (2006). *Mengganyang Komunis*. Jakarta: Taruna Muslim Press.

..... (2016) *Menangkal Kebangkitan Partai Komunis Indonesia*. Jakarta: Taruna Muslim Press.

Internet:

Komunis Gaya Baru. (2021). Channel YouTube Universitas Indonesia Watch. <https://youtu.be/Mc58AOL5ts0>.